

**Rancangan Awal**

# **RANCANGAN KERJA (RENJA) TAHUN 2024**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN GOWA**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-NYA sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, disamping itu untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan SKPD.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Sungguminasa, Januari 2023  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH  
KAB. GOWA,**



**H. ABDUL KARIM DANIA, SE., MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19641231 199603 1 012

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	1
<b>DAFTAR ISI</b>	2
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang .....	4
I.2 Landasan Hukum .....	6
I.3 Maksud dan Tujuan .....	8
I.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD	17
2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	23
3.3 Program dan Kegiatan .....	24
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan .....	30
5.2 Rencana Tindak Lanjut .....	30

### **Lampiran :**

- *Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023;*
- *Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa;*
- *Review Terhadap Rancangan Awal Renja/RKPD Tahun 2024;*
- *Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.*

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyesuaian program dan kegiatan

sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (Renja) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

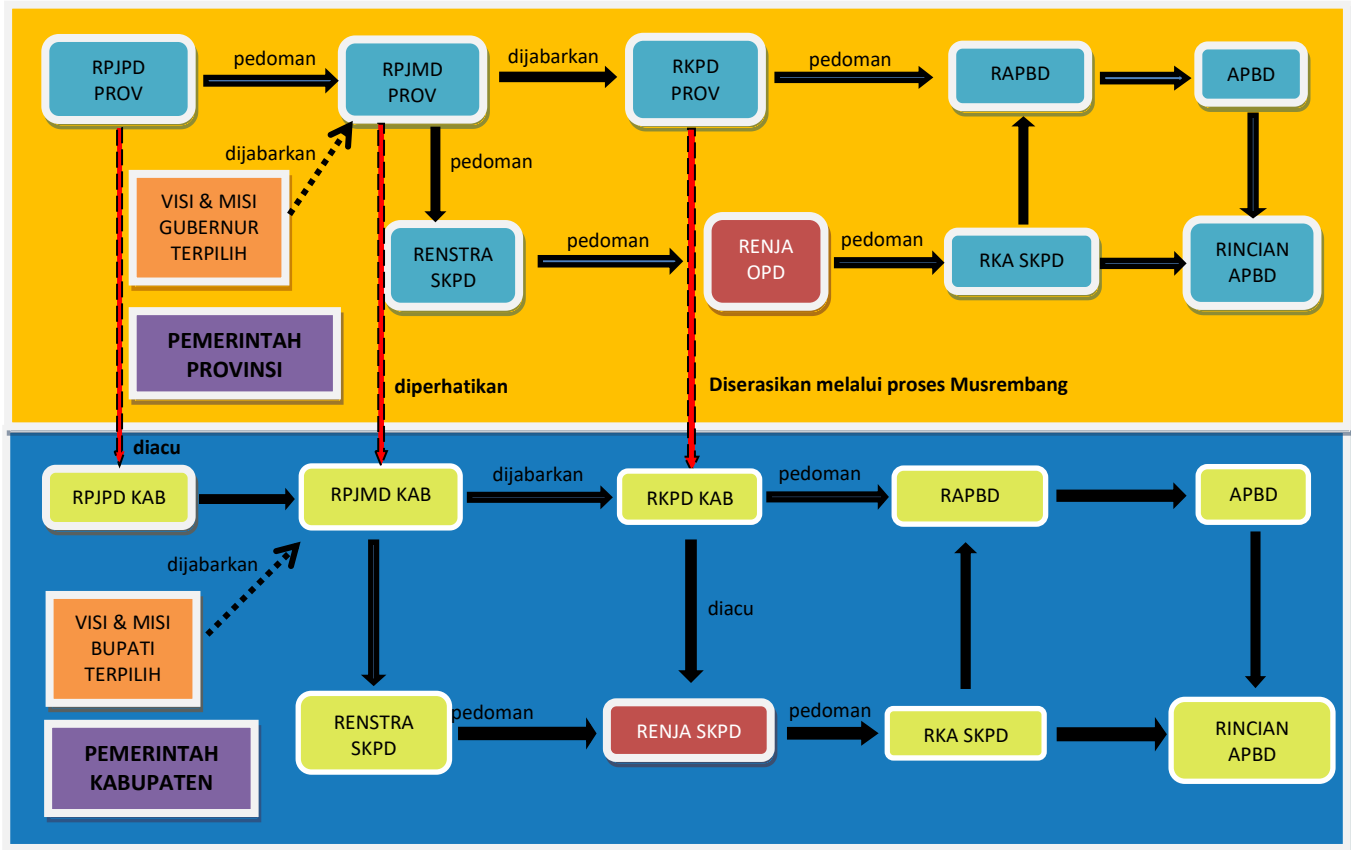
Prinsip – prinsip didalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan;
2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju;
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2024 yang memuat arah kebijakan Pemerintah selama satu tahun.;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing – masing SKPD.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan

dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Seperti yang terlihat dibawah ini :

**Bagan I.1**  
**Skema Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**



## I.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang – undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4287; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012–2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021–2026 ;
13. Peraturan Bupati Gowa Nomor 100 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dimaksudkan untuk :

1. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan program dengan penganggaran;



4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
5. Menyelaraskan program dengan penganggaran.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Sebagai Upaya mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa;
4. Dapat menjadi alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Badan setiap Tahun Anggaran, dengan menggunakan tiga tolok ukur yaitu :
  - Masukan
  - Keluaran
  - Hasil

#### **I.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

#### **I.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan

dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

#### I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

#### I.3 Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

#### I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

#### II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

### II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

## II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kabupaten/kota

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

III.3 Program dan kegiatan berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan. Merealisasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tahun berjalan. Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dalam menyusun Program Kegiatan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selain mempunyai tugas dan fungsi sebagai SKPD juga melakukan fungsi sebagai Bendahara Umum.

Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa mengelola Anggaran Belanja sebesar Rp. **295.488.615.909,00** dan dapat direalisasikan sebesar Rp. **262.015.912.237,00** sebagaimana yang terdiri dari 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 41 (empat satu puluh) sub.kegiatan. Reviuw Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA s/d tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yang masih mengacu pada RENSTRA periode 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

***Table TC-29***

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan periode 2016–2021. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang dapat diukur.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan BPKD sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel pencapaian kinerja pelayanan Tahun 2022 sebagai berikut :

### **Tabel TC-30**



## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa**

Dari telaahan isu-isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa serta telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka ada beberapa hal yang menjadi isu penting bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kedepannya yakni:

1. Belum optimalnya pengintegrasian pengelolaan keuangan;
2. Belum efektif dan efisiennya perencanaan anggaran berbasis Kinerja;
3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah;
3. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal;
5. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset;
6. Integrasi sistem antar pengelolaan keuangan dengan pengelolaan aset (barang milik daerah) merupakan suatu yang menjadi sangat urgen dalam mendukung terciptanya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut :

**Tabel T-C-31**

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang keuangan Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut. Usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

### **Tabel TC-32**

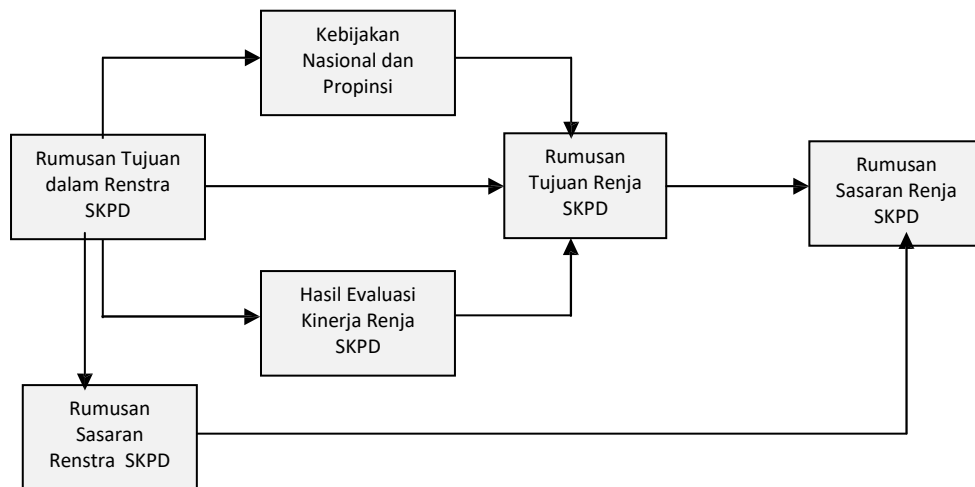
## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD seperti terlihat pada bagan di bawah ini :

**Bagan III.1**

#### PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KABUPATEN



#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Gowa Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Gowa yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Sejalan dengan visi dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa.

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016-2021, memperhatikan hasil analisis isu strategis, prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa periode 2021-2026 maka Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih priode 2021-2026.

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Gowa adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”***.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih periode 2021 – 2026 yaitu :

1. ***Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.***

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak

anak, serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan berbudaya.

2. ***Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.***

Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

3. ***Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.***

Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

4. ***Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.***

Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan public berkualitas yang diwujudkan melalui upaya perbaikan layanan publik secara terpadu dan terintegrasi dan peningkatan kualitas birokrasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut diatas maka peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sangat penting artinya khususnya dalam penyiapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam melaksanakan tugas pokok pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa bertugas membantu Pemerintah Kabupaten Gowa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang terbaik dan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi IV yaitu, ***Mengembangkan Tata kelola Pemerintahan Inovatif melalui Informasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas.***

Dari Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa di periode tahun 2021-2026, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan aset daerah akan berupaya dengan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung Program Prioritas dari Pemerintah Kabupaten Gowa.

### **3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mendukung pencapaian misi kepala Daerah adalah sebagai berikut :

***“Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan  
Pemerintah Daerah”.***

### **3.2.2 Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategis organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

***“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”***

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024, program dan kegiatan yang direncanakan sebanyak 3 program dan 12 kegiatan dengan 41 sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:  
Kegiatan :



1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - Sub Kegiatan :
    - ◆ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - ◆ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan :
    - ◆ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - ◆ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - ◆ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - Sub Kegiatan :
    - ◆ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - ◆ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan :
    - ◆ Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - ◆ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - ◆ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - ◆ Penyediaan Bahan/Material
    - ◆ Fasilitas Kunjungan Tamu
    - ◆ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan :

- ◆ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
    - ◆ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - ◆ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
    - ◆ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - ◆ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian Kegiatan sebagai berikut :
- 1). Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Sub Kegiatan :
    - ◆ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
    - ◆ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
    - ◆ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
    - ◆ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
    - ◆ Koordinasi, dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD
    - ◆ Koordinasi, dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 2). Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Sub Kegiatan :
    - ◆ Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
    - ◆ Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

- ◆ Penatausahaan Pembiayaan Daerah
  - ◆ Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
  - ◆ Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3). Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Sub Kegiatan :
    - ◆ Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
    - ◆ Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
    - ◆ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
    - ◆ Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4). Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sub Kegiatan :
    - ◆ Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
    - ◆ Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
    - ◆ Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
    - ◆ Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan rincian Kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Sub Kegiatan :

- ◆ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- ◆ Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- ◆ Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- ◆ Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Berikut Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju tahun 2025 sesuai dengan Rancangan awal RKPD , dapat dilihat pada table berikut : **Table 3.3**

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Gowa yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (RENJA) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana Kerja dan Pendanaan untuk kegiatan tahun 2024 merupakan implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Berdasarkan telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 serta memperhatikan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKD, maka pada Tahun 2024 rumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan sebanyak 3 program dan 12 kegiatan serta 41 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. **295.488.615.909,00**. Seluruh anggaran program dan kegiatan serta sub kegiatan BPKD Tahun 2024 bersumber dari APBD Kabupaten Gowa. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif BPKD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

#### **Tabel T-C 33**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa tahun 2024, disusun berdasarkan Rencana Strategis BPKD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024.

#### **4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan :**

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sebagai salah satu sarana tata Kelola organisasi yang dapat dipergunakan untuk :

- a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
- b. Merumuskan program dan sasaran agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
- c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun;
- e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaiannya.

#### **4.2 Rencana Tindak Lanjut**

Dengan tersusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini, maka rekomendasi untuk Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;
- b. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dan asset daerah;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja yang dijabarkan dengan mewujudkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing bidang.

# ***Lampiran***



**Tabel T-C.29.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Kabupaten Gowa**

**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)				
<b>Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>														
<b>Bidang Usuran Keuangan</b>														
		Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	Belum realisasi	-	WTP	Belum realisasi	-			
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD Pokok	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%			
			Ketepatan waktu penetapan APBD Perubahan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Belum realisasi	Tepat Waktu			
5	02	01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	19 Persen		25 Persen	20 Persen	80	19 Persen	39 Persen	205		
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen	-	23 Dokumen	7 Dokumen	30	7 dokumen	14 dokumen	200	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 dokumen	6 dokumen	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	-	20 Dokumen	4 Dokumen	20	4 Laporan	8 Laporan	200
5 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan</b>	207	-	208 Persen	208 Persen	100	207 Persen	415 Persen	200
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	-	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	100	50 Orang/Bulan	101 Orang/Bulan	202
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	156 Dokumen	-	156 Dokumen	156 Dokumen	100	156 Dokumen	312 Dokumen	200
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	200
5 02 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian</b>	5 Paket	-	13 Orang	56 Orang	431	10 Persen	66 Persen	1320
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	-	3 Paket	54 Orang	1800	3 Paket	57 Paket	1900
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	-	10 Orang	2 Orang	20	7 Orang	9 Orang	450

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 02 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	212 Paket	-	2568 Persen	691 Persen	27	212 Persen	903 Persen	426
5 02 01 2.06 01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	10 Jenis	10 Jenis	100	1 Paket	11 Paket	1100
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	-	5 Jenis	0 Jenis	0	2 Paket	2 Paket	100
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	5 Dokumen	-	50 Dokumen	5 Dokumen	10	5 Dokumen	10 Dokumen	200
5 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	-	2300 Paket	0 Paket	0	2 Paket	2 Paket	100
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	-	12 Orang	534 Orang	4450	12 Laporan	546 Laporan	4550
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan	-	191 Kali	142 Kali	74	190 Laporan	332 Laporan	175
5 02 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah</b>	5 Unit	-	4 Persen	67 Persen	1675	5 Persen	72 Persen	1440
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	4 Unit	67 Unit	1675	5 unit	72 unit	1440
5 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	24 Laporan	-	108 Persen	23 Persen	21	24 Persen	47 Persen	196
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	12 Unit	3 Unit	25	12 Laporan	15 Laporan	125

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	96 Unit	20 Unit	21	12 Laporan	32 Laporan	267
5 02 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>28 Unit</b>	<b>-</b>	<b>48 Persen</b>	<b>30 Persen</b>	<b>63</b>	<b>28 unit</b>	<b>58 unit</b>	<b>207</b>
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22 Unit	-	30 Unit	15 Unit	50	22 unit	37 unit	168
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	6 Unit	-	18 Jenis	15 Jenis	83	6 unit	21 unit	350
5 02 02	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Tingkat Kepatuhan terhadap standar Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>20 Persen</b>	<b>-</b>	<b>20 Persen</b>	<b>20 Persen</b>	<b>100</b>	<b>20 Persen</b>	<b>40 Persen</b>	<b>200</b>
5 02 02 2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen penganggaran Pemerintah daerah yang diselesaikan</b>	<b>224 Dokumen</b>	<b>-</b>	<b>224 Dokumen</b>	<b>224 Dokumen</b>	<b>100</b>	<b>224 Dokumen</b>	<b>448 Dokumen</b>	<b>200</b>
5 02 02 2.01 03	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA Pokok SKPD yang di verifikasi	54 Dokumen	-	54 Dokumen	54 Dokumen	100	54 Dokumen	108 Dokumen	200
5 02 02 2.01 04	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	-	54 Dokumen	54 Dokumen	100	54 Dokumen	108 Dokumen	200
5 02 02 2.01 05	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	-	54 Dokumen	54 Dokumen	100	54 Dokumen	108 Dokumen	200
5 02 02 2.01 06	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	-	54 Dokumen	54 Dokumen	100	54 Dokumen	108 Dokumen	200
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	8 Dokumen	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	8 Dokumen	200
<b>5 02 02 2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan Perbendaharaan</b>	<b>15890 Dokumen</b>	<b>-</b>	<b>15890 Persen</b>	<b>19396 Persen</b>	<b>122</b>	<b>15890 Persen</b>	<b>35286 Persen</b>	<b>222</b>
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7500 Dokumen	-	7500 SP2D	9253 SP2D	123	7500 Dokumen	16753 Dokumen	223
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengadilan dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	810 Dokumen	-	810 SPD	810 SPD	100	810 Dokumen	1620 Dokumen	200
5 02 02 2.02 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2400 Dokumen	-	2400 SP2D	2405 SP2D	100	2400 Dokumen	4805 Dokumen	200
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5100 Dokumen	-	5100 Dokumen	6848 Dokumen	134	5100 Dokumen	11948 Dokumen	234
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	-	80 Orang	80 Orang	100	80 Orang	160 Orang	200
<b>5 02 02 2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>741 Laporan</b>	<b>-</b>	<b>741 Persen</b>	<b>796 Persen</b>	<b>107</b>	<b>741 Persen</b>	<b>1537 Persen</b>	<b>207</b>
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649 Laporan	-	649 Dokumen	706 Dokumen	109	649 Laporan	1355 Laporan	209

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Kabupaten /Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan PERDA Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	10 Laporan	-	10 Laporan	10 Laporan	100	10 Laporan	20 Laporan	200
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	-	2 Temuan	0 Temuan	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	-	80 Orang	80 Orang	100	80 Orang	160 Orang	200
5 02 02 2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan kewenangan Pengelolaan Keuangan</b>	244 Laporan	-	244 Persen	244 Persen	100	244 Laporan	488 Laporan	200
5 02 02 2.04 03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	200
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	121 Laporan	-	121 Desa	121 Desa	100	121 Laporan	242 Laporan	200
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	-	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Laporan	2 Laporan	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	121 Laporan	-	121 Laporan	121 Laporan	100	121 Laporan	242 Laporan	200
5 02 03	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang diselesaikan</b>	<b>20 Persen</b>	-	<b>20 Persen</b>	<b>20 Persen</b>	<b>100</b>	<b>20 Persen</b>	<b>40 Persen</b>	<b>200</b>
5 02 03 2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Yang diselesaikan</b>	<b>39 Dokumen</b>	-	<b>39 Dokumen</b>	<b>52 Dokumen</b>	<b>133</b>	<b>39 Persen</b>	<b>91 Persen</b>	<b>233</b>
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	8 Dokumen	200
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaa, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	-	30 Dokumen	43 Dokumen	143	30 Dokumen	73 Dokumen	243
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Laporan	8 Laporan	200
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Laporan	2 Laporan	200

Sungguminasa, Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

  
**H. ABDUL KARIM DANIA, SE., M.M.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda

**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa**  
**Kabupaten Gowa**

**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Opini BPK atas LKPD		<i>Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD</i> <i>Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD</i> <b>Manajemen Asset :</b> 1 Apakah ada daftar aset tetap (ya/tidak) 2 Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (ya/tidak) 3 Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (ya/tidak) 4 Apakah ada nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (ya/tidak) <i>Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya</i>					83.96	Belum Realisasi			Permendagri 18/2020 Hal 167	
								96.55	Belum Realisasi				
				ya	ya	ya	ya	ya	Belum Realisasi	ya	ya		
				ya	ya	ya	ya	ya	Belum Realisasi	ya	ya		
				ya	ya	ya	ya	ya	Belum Realisasi	ya	ya		
				ya	ya	ya	ya	ya	Belum Realisasi	ya	ya		
				19	19	19	19	19.95	Belum Realisasi				
2	Ketepatan waktu penetapan APBD Pokok dan APBD Perubahan		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum Realisasi	Belum Realisasi	WTP	WTP	(Permendagri 86/2017 Hal 203)	

Sungguminasa, Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



**H. ABDUL KARIM DANIA, SE., M.M.**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda



**Tabel T-C 31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal Renja/RKPD Tahun 2024**  
**Pemerintah Kabupaten Gowa**

**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	19 Persen	117,686,041,565.00	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	19 Persen	117,686,041,565.00	
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	BPKD	<i>Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</i>	7 Dokumen	69,656,800.00	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	BPKD	<i>Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</i>	7 Dokumen	69,656,800.00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	48,938,800.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	48,938,800.00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 Laporan	20,718,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 Laporan	20,718,000.00	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	BPKD	<b>Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan</b>	207 Laporan	116,586,787,965.00	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	BPKD	<b>Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan</b>	207 Laporan	116,586,787,965.00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	116,087,067,222.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	116,087,067,222.00	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	156 Dokumen	463,311,743.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	156 Dokumen	463,311,743.00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	36,409,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	36,409,000.00	
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	BPKD	<b>Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian</b>	217 Paket	219,000,000.00	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	BPKD	<b>Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian</b>	217 Paket	219,000,000.00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	130,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	130,500,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	BPKD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	88,500,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	BPKD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	88,500,000.00	
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>212 Paket</b>	<b>514,103,500.00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>212 Paket</b>	<b>514,103,500.00</b>	
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,084,200.00	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,084,200.00	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	97,662,700.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	97,662,700.00	
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	BPKD	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	5 Dokumen	6,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	BPKD	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	5 Dokumen	6,000,000.00	
4	Penyediaan Bahan / Material	BPKD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	71,500,000.00	Penyediaan Bahan / Material	BPKD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	71,500,000.00	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	64,830,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	64,830,000.00	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan	264,026,600.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan	264,026,600.00	
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>5 Unit</b>	<b>62,013,400.00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>5 Unit</b>	<b>62,013,400.00</b>	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	62,013,400.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	62,013,400.00	
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24 Laporan</b>	<b>82,135,000.00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24 Laporan</b>	<b>82,135,000.00</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15,125,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15,125,000.00	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	67,010,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	67,010,000.00	

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>28 Unit</b>	<b>152,344,900.00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>28 Unit</b>	<b>152,344,900.00</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKD	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22 Unit	128,624,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKD	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22 Unit	128,624,000.00	
2	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	6 Unit	23,720,900.00	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	6 Unit	23,720,900.00	
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Tingkat Kepatuhan terhadap standar Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>20 Persen</b>	<b>226,220,170,540.00</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Tingkat Kepatuhan terhadap standar Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>20 Persen</b>	<b>226,220,170,540.00</b>	
1	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>Persentase dokumen penganggaran Peemrintah daerah yang diselesaikan Tepat Waktu</b>	<b>224 Dokumen</b>	<b>743,364,650.00</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>Persentase dokumen penganggaran Peemrintah daerah yang diselesaikan Tepat Waktu</b>	<b>224 Dokumen</b>	<b>743,364,650.00</b>	
1	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA -SKPD	BPKD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	16,891,750.00	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA -SKPD	BPKD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	16,891,750.00	
2	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	17,116,550.00	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	17,116,550.00	
3	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	53,138,800.00	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	53,138,800.00	
4	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	48,645,000.00	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	48,645,000.00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	444,645,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	444,645,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	162,927,550.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	162,927,550.00	
2	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	BPKD	<b>Persentase Ketepatan pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah</b>	15890 Dokumen	553,571,022.00	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	BPKD	<b>Persentase Ketepatan pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah</b>	15890 Dokumen	553,571,022.00	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7500 Dokumen	42,485,000.00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7500 Dokumen	42,485,000.00	
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengadilan dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	810 Dokumen	109,151,522.00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengadilan dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	810 Dokumen	109,151,522.00	
3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2400 Dokumen	101,760,400.00	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2400 Dokumen	101,760,400.00	
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5100 Dokumen	149,784,300.00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5100 Dokumen	149,784,300.00	
5	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	150,389,800.00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	150,389,800.00	
3	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	BPKD	<b>Persentase Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan</b>	741 Laporan	366,104,100.00	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	BPKD	<b>Persentase Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan</b>	741 Laporan	366,104,100.00	
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649 Laporan	96,722,300	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649 Laporan	96,722,300.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota	BPKD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan PERDA Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	10 Laporan	182,768,100	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota	BPKD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan PERDA Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	10 Laporan	182,768,100.00	
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	21,249,700	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	21,249,700.00	
4	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	65,364,000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	65,364,000.00	
4	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>Persentase Urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan</b>	<b>290</b> Laporan	<b>224,557,130,768.00</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>Persentase Urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan</b>	<b>290</b> Laporan	<b>224,557,130,768.00</b>	
1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	13,647,666,000.00	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	13,647,666,000.00	
2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	121 Laporan	203,266,505,000.00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	121 Laporan	203,266,505,000.00	
3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	5,967,516,068.00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	5,967,516,068.00	
4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	167 Laporan	1,675,443,700.00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	167 Laporan	1,675,443,700.00	
III	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang diselesaikan</b>	<b>20</b> <b>Persen</b>	<b>509,570,000</b>	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang diselesaikan</b>	<b>20</b> <b>Persen</b>	<b>509,570,000.00</b>	
I	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang diselesaikan</b>	<b>39</b> <b>Dokumen</b>	<b>509,570,000.00</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang diselesaikan</b>	<b>39</b> <b>Dokumen</b>	<b>509,570,000.00</b>	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	60,878,500.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKD	<b>Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang diselesaikan</b>	4 Dokumen	60,878,500.00	
2	Optimalisasi Penggunaa, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	77,353,600.00	Optimalisasi Penggunaa, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	77,353,600.00	
3	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	38,762,100.00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	38,762,100.00	
4	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	332,575,800.00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	332,575,800.00	

Sungguminasa, Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024**  
**Kabupaten Gowa**

**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Uraian Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada usulan masyarakat krn pelayanan BPKD tidak berhubungan langsung dengan masyarakat

Sungguminasa, Januari 2023

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

  
**H. ABDUL KARIM DANIA, SE., M.M.**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda

**TABEL**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA			REALISASI	CAPAIAN
				2022	2023	2024	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan :Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	Belum Realisasi	Belum Realisasi
2	Sasaran :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD Pokok dan APBD Perubahan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sungguminasa, Januari 2023

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**



**H. ABDUL KARIM DANIA, SE., M.M.**

Pangkat : Pembina Utama Muda



Tabel T-C.33.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**  
Kabupaten Gowa

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>													
<b>Bidang Urusan Keuangan</b>													
<b>Badan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>													
5	02	01		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	BPKD	19 Persen	117,686,041,565.00	PAD	Rancangan awal RKPD	19 Persen	117,686,041,565.00	
5	02	01	2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</i>	BPKD	7 Dokumen	69,656,800.00	PAD	Rancangan awal RKPD	7 Dokumen	69,656,800.00	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKD	3 Dokumen	48,938,800.00	PAD	Rancangan awal RKPD	3 Dokumen	48,938,800.00
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKD	4 Laporan	20,718,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	4 Laporan	20,718,000.00
5	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan</b>	BPKD	207	116,586,787,965.00		Rancangan awal RKPD	207	116,586,787,965.00
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKD	50 Orang/bulan	116,087,067,222.00	PAD	Rancangan awal RKPD	50 Orang/bulan	116,087,067,222.00
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKD	156 Dokumen	463,311,743.00	PAD	Rancangan awal RKPD	156 Dokumen	463,311,743.00
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKD	1 Laporan	36,409,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	1 Laporan	36,409,000.00
5	02	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian</b>	BPKD	217 Paket	219,000,000.00		Rancangan awal RKPD	217 Paket	219,000,000.00
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BPKD	3 Paket	130,500,000	PAD	Rancangan awal RKPD	3 Paket	130,500,000
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BPKD	2 Orang	88,500,000	PAD	Rancangan awal RKPD	2 Orang	88,500,000
5	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	BPKD	212 Paket	514,103,500.00		Rancangan awal RKPD	212 Paket	514,103,500.00
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPKD	1 Paket	10,084,200.00	PAD	Rancangan awal RKPD	1 Paket	10,084,200.00
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPKD	2 Paket	97,662,700.00	PAD	Rancangan awal RKPD	2 Paket	97,662,700.00
5	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	BPKD	5 Dokumen	6,000,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	5 Dokumen	6,000,000.00
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	BPKD	2 Paket	71,500,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	2 Paket	71,500,000.00
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKD	12 Laporan	64,830,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	12 Laporan	64,830,000.00

5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKD	190	Laporan	264,026,600.00	PAD	Rancangan awal RKPD	190	Laporan	264,026,600.00
5	02	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>5</b>	<b>Unit</b>	<b>62,013,400.00</b>		Rancangan awal RKPD	<b>5</b>	<b>Unit</b>	<b>62,013,400.00</b>
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BPKD	5	Unit	62,013,400.00	PAD	Rancangan awal RKPD	5	Unit	62,013,400.00
5	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>24</b>	<b>Laporan</b>	<b>82,135,000.00</b>		Rancangan awal RKPD	<b>24</b>	<b>Laporan</b>	<b>82,135,000.00</b>
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPKD	12	Laporan	15,125,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	12	Laporan	15,125,000.00
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKD	12	Laporan	67,010,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	12	Laporan	67,010,000.00
5	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>28</b>	<b>Unit</b>	<b>152,344,900.00</b>		Rancangan awal RKPD	<b>28</b>	<b>Unit</b>	<b>152,344,900.00</b>
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	BPKD	22	Unit	128,624,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	22	Unit	128,624,000.00
5	02	01	2.09	10	Pemelihara/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	BPKD	6	Unit	23,720,900.00	PAD	Rancangan awal RKPD	6	Unit	23,720,900.00
5	02	02			<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Tingkat Kepatuhan terhadap standar Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>20</b>	<b>Persen</b>	<b>1,663,039,772.00</b>		Rancangan awal RKPD	<b>20</b>	<b>Persen</b>	<b>1,663,039,772.00</b>
5	02	02	2.01		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase dokumen penganggaran Pemerintah daerah yang diselesaikan</b>	<b>BPKD</b>	<b>224</b>	<b>Dokumen</b>	<b>743,364,650.00</b>		Rancangan awal RKPD	<b>224</b>	<b>Dokumen</b>	<b>743,364,650.00</b>
5	02	02	2.01	03	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA -SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKD	54	Dokumen	16,891,750.00	PAD	Rancangan awal RKPD	54	Dokumen	16,891,750.00
5	02	02	2.01	04	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKD	54	Dokumen	17,116,550.00	PAD	Rancangan awal RKPD	54	Dokumen	17,116,550.00
5	02	02	2.01	05	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	BPKD	54	Dokumen	53,138,800.00	PAD	Rancangan awal RKPD	54	Dokumen	53,138,800.00
5	02	02	2.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	BPKD	54	Dokumen	48,645,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	54	Dokumen	48,645,000.00
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKD	4	Dokumen	444,645,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	4	Dokumen	444,645,000.00
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKD	4	Dokumen	162,927,550.00	PAD	Rancangan awal RKPD	4	Dokumen	162,927,550.00
5	02	02	2.02		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>15890</b>	<b>Dokumen</b>	<b>553,571,022.00</b>		Rancangan awal RKPD	<b>15890</b>	<b>Dokumen</b>	<b>553,571,022.00</b>
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKD	7500	Dokumen	42,485,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	7500	Dokumen	42,485,000.00
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengadilan dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKD	810	Dokumen	109,151,522.00	PAD	Rancangan awal RKPD	810	Dokumen	109,151,522.00
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKD	2400	Dokumen	101,760,400.00	PAD	Rancangan awal RKPD	2400	Dokumen	101,760,400.00
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKD	5100	Dokumen	149,784,300.00	PAD	Rancangan awal RKPD	5100	Dokumen	149,784,300.00

5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKD	80	Orang	150,389,800.00	PAD	Rancangan awal RKPD	80	Orang	150,389,800.00
5	02	02	2.03		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan</b>	BPKD	741	Laporan	366,104,100.00		Rancangan awal RKPD	741	Laporan	366,104,100.00
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKD	649	Laporan	96,722,300.00	PAD	Rancangan awal RKPD	649	Laporan	96,722,300.00
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan PERDA Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	BPKD	10	Laporan	182,768,100.00	PAD	Rancangan awal RKPD	10	Laporan	182,768,100.00
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKD	2	Dokumen	21,249,700.00	PAD	Rancangan awal RKPD	2	Dokumen	21,249,700.00
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKD	80	Orang	65,364,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	80	Orang	65,364,000.00
5	02	02	2.04		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan</b>	BPKD	290	Laporan	224,557,130,768.00		Rancangan awal RKPD	290	Laporan	224,557,130,768.00
5	02	02	2.04	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKD	1	Laporan	13,647,666,000.00	DAU	Rancangan awal RKPD	1	Laporan	13,647,666,000.00
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	BPKD	121	Laporan	203,266,505,000.00	DAU	Rancangan awal RKPD	121	Laporan	203,266,505,000.00
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKD	1	Laporan	5,967,516,068.00	DAU	Rancangan awal RKPD	1	Laporan	5,967,516,068.00
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKD	167	Laporan	1,675,443,700.00	PAD	Rancangan awal RKPD	167	Laporan	1,675,443,700.00
5	02	03			<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang diselesaikan</b>	BPKD	20	Persen	509,570,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	20	Persen	509,570,000.00
5	02	03	2.01		<b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang diselesaikan</b>	BPKD	39	Dokumen	509,570,000.00	PAD	Rancangan awal RKPD	39	Dokumen	509,570,000.00
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKD	4	Dokumen	60,878,500.00	PAD	Rancangan awal RKPD	4	Dokumen	60,878,500.00
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaa, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKD	30	Dokumen	77,353,600.00	PAD	Rancangan awal RKPD	30	Dokumen	77,353,600.00
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	4	Laporan	38,762,100.00	PAD	Rancangan awal RKPD	4	Laporan	38,762,100.00
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BPKD	1	Laporan	332,575,800.00	PAD	Rancangan awal RKPD	1	Laporan	332,575,800.00

Sunguminasa, Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

